

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Guna menunjukkan alokasi sumber daya manusia, material, dan sumber daya lainnya secara sistematis dan akuntabel diperlukan suatu rencana keuangan yang andal dan terwujud dalam suatu penganggaran. Terkait dengan rencana manajemen, sistem penganggaran berfungsi sebagai suatu metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap biaya yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan manfaat yang dihasilkan dimana manfaat tersebut dideskripsikan melalui seperangkat sasaran dan dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja. Untuk mengidentifikasi keterkaitan biaya dengan manfaat serta keterkaitan antara nilai uang dan hasil di tingkat pemerintahan daerah, pemda menuangkan penganggaran tersebut dalam suatu rencana keuangan yang dikenal dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) (Yuwono, et al. 2008:85).

Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pemborosan sumber daya, meningkatkan efisiensi dan efektivitas

perekonomian, serta harus memerhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Hal ini merupakan tuntutan dari fungsi alokasi dan fungsi distribusi APBD. Secara garis besar, srtuktur APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD berpedoman pada Rencana Kerja (Renja) Pemerintahan Daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat demi tercapainya tujuan bernegara (Nordiawan, et al. 2007:39-43).

Menurut UU No. 25/1999, dalam rangka implementasi desentralisasi atau dalam rangka mencapai tujuan, pemerintah pusat akan mengalokasikan uang yang disebut dana perimbangan yang terdiri atas bagian daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Bagian daerah terdiri atas hasil pajak yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan PPh perorangan. Kriteria alokasi dana perimbangan didasarkan pada sejumlah variabel yang diatur dalam Undang-Undang (Tambunan, 2001:241).

Dana Alokasi Umum (DAU) sering disebut bantuan tak bersyarat (*unconditional grants*) karena merupakan jenis transfer dana antar tingkat pemerintah yang tidak terkait dengan program pengeluaran tertentu. DAU ini dimaksudkan untuk menggantikan transfer berupa subsidi daerah otonomi (SDO) dan inpres. Tujuan bantuan ini adalah untuk menyediakan dana yang cukup bagi pemda dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Bantuan umum ini

dapat juga dilihat sebagai suatu mekanisme transfer daya beli (*purchasing power*) dari pemerintah pusat ke pemda.

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan jenis transfer yang memiliki persyaratan tertentu yang terkait di dalam bantuan. Bantuan khusus ini diberikan untuk mendorong pemda dalam menambah barang dan jasa publik tertentu. Jadi, DAK dapat menjamin bahwa pemda akan menyediakan jasa publik yang sesuai dengan program pemerintah pusat, tanpa harus membebani pemda. Dalam UU NO. 25/1999 dinyatakan bahwa DAK diberikan untuk kegiatan investasi yang merupakan prioritas nasional atau suatu kondisi khusus daerah, misalnya daerah transmigrasi (Tambunan, 2001:243).

Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah daerah memerlukan pembiayaan yang tidak sedikit jumlahnya. Oleh karena itu pemerintah daerah juga perlu memahami darimana sumber keuangan daerah itu akan diperoleh. Dalam hal ini Undang-Undang No. 22 tahun 1999 juga sudah menyebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang syah. Sumber pendapatan lainnya yaitu dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang syah (Suparmoko, 2002:27).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut

berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Setiyawati dan Ardi Hamzah, 2007). Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selalu diupayakan karena merupakan penerimaan dari usaha untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah, PAD harus berdampak pada perekonomian daerah. Jika peningkatan PAD akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, maka terdapat kemungkinan DAU dan DAK juga berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, karena nilai DAU dan DAK pada umumnya lebih besar dibandingkan kontribusi PAD (Maryati dan Endrawati, 2010).

Pertumbuhan penduduk juga berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi. Penduduk memiliki dua peranan dalam pembangunan ekonomi, satu dari segi permintaan dan yang lain dari segi penawaran. Dari segi permintaan penduduk bertindak sebagai konsumen dan dari segi penawaran bertindak sebagai produsen. Oleh karena itu perkembangan penduduk yang cepat tidaklah selalu merupakan penghambat bagi jalannya pembangunan ekonomi jika penduduk ini mempunyai kapasitas yang tinggi untuk menghasilkan dan menyerap hasil produksi yang dihasilkan. Ini berarti tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi disertai dengan tingkat penghasilan yang tinggi pula. Jadi pertumbuhan penduduk dengan tingkat penghasilan yang rendah tidak ada gunanya bagi pembangunan ekonomi (Irawan dan Suparmoko, 2008:86).

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan prosesnya yang berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi. Karena penduduk bertambah terus dan berarti kebutuhan ekonomi juga bertambah terus, maka dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahun. Hal ini hanya bisa didapat lewat peningkatan output agregat (barang dan jasa) atau Produk Domestik Bruto (PDB) setiap tahun. Jadi, dalam pengertian ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi adalah penambahan PDB yang berarti juga penambahan Pendapatan Nasional (PN) (Tambunan, 2001:38).

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu (Maryati dan Endrawati, 2010). Pertumbuhan ekonomi bersangkutan-paut dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Dapat dikatakan bahwa pertumbuhan menyangkut perkembangan yang berdimensi tunggal dan diukur dengan meningkatnya hasil produksi dan pendapatan. Dalam pertumbuhan ekonomi, biasanya ditelaah proses proses produksi yang melibatkan sejumlah jenis produk dengan menggunakan sejumlah sarana produksi tertentu (Djojohadikusumo, 1994:1).

Tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak akan memberikan arti apabila tidak diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan

ekonomi sering diukur dengan menggunakan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB/PDRB), namun demikian indikator ini dianggap tidak selalu tepat dikarenakan tidak mencerminkan makna pertumbuhan yang sebenarnya (Harianto dan Priyo Hari Adi, 2007). PDRB dalam statistik disajikan dalam dua penilaian, antara lain atas harga berlaku (*at current market*) yaitu PDRB yang memasukkan faktor inflasi didalamnya dan atas dasar harga konstan (*at constant market price*) yaitu PDRB yang sudah mengeliminasi faktor inflasi. Oleh karena itu, daerah tidak akan berhasil bila daerah tidak mengalami pertumbuhan ekonomi yang berarti meskipun terjadi peningkatan PAD. Karena tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting pemerintah daerah maupun pemerintah pusat (Maryati dan Endrawati, 2010).

Perbedaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan pertumbuhan penduduk yang berbeda-beda antara daerah satu dengan daerah yang lainnya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang berbeda pula.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA ALOKASI KHUSUS (DAK), PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN PERTUMBUHAN PENDUDUK TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KARESIDENAN SURAKARTA TAHUN 2003-2011”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas terdapat beberapa pokok permasalahan yang dibahas antara lain :

1. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi?
2. Apakah pertumbuhan penduduk berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dapat diketengahkan tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi.
2. Menganalisis pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian di atas diantaranya adalah:

1. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi masing-masing pemegang kebijakan terutama pemerintah daerah.

2. Bagi Peneliti

Dapat menambah pengetahuan peneliti tentang pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan pertumbuhan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi di karesidenan Surakarta.

3. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi dan gambaran informasi sebagai bahan studi komparatif bagi penelitian selanjutnya.

E. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini disajikan dalam lima bab yang berurutan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang yang mendasari munculnya masalah dalam penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang uraian mengenai teori-teori yang melandasi penelitian ini diantaranya adalah Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), pertumbuhan penduduk, dan pertumbuhan ekonomi. Penelitian terdahulu dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi uraian mengenai jenis penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, jenis data dan sumber data, variabel penelitian dan pengukuran variabel, dan teknik analisis data yang digunakan.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini dibahas mengenai hasil dari pengujian statistik yang digunakan dan selanjutnya dilakukan pembahasan dari hasil penelitian ini.

BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian berikutnya.